



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 21 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PELABUHAN PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Membaca :**
1. surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 552.3/4058/PERHUB/2004 tanggal 12 Oktober 2004;
  2. surat Walikota Palembang Nomor 632/001993/Dishub tanggal 6 September 2004;
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, diatur bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan umum, penyelenggara pelabuhan wajib menyusun rencana induk pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota;
  - c. sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, serta untuk memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Palembang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Palembang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4001);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK PELABUHAN PALEMBANG.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

2. Kepelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
3. Rencana Induk Pelabuhan Palembang untuk selanjutnya disebut rencana induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Palembang yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan daratan serta perairan untuk kegiatan kepelabuhanan dan kegiatan penunjang pelabuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.
4. Rencana Tapak adalah proses lanjut dari Rencana Induk Pelabuhan Palembang yang mencakup rancangan tata letak pelabuhan yang bersifat teknis dan konseptual, perletakan setiap fungsi lahan, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarananya.
5. Rencana Konstruksi Terinci adalah penjabaran secara rinci rencana tapak sebagai dasar kegiatan pembangunan Pelabuhan Palembang yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahannya.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan pada Pelabuhan Palembang yang meliputi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangannya sesuai rencana induk, dibutuhkan lahan daratan Boom Baru seluas 26,34 Ha, Sei Lais 200 Ha, dan areal perairan untuk Boom Baru dan Sei Lais 5.889 Ha.
- (2) Kebutuhan lahan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. lahan daratan eksisting untuk kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di Boom Baru seluas 24, 6 Ha dan Sei Lais 200 Ha;
  - b. lahan daratan untuk pengembangan pelabuhan Boom Baru seluas 1,74 Ha.
- (3) Kebutuhan areal perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. area labuh kapal 2.359,5 Ha;
  - b. area dilarang labuh 795 Ha;
  - c. kolam sandar kapal 1.400 Ha;
  - d. alur pelayaran dengan lebar 100 – 300 meter;
  - e. kolam putar diameter 250 meter;
  - f. area labuh kapal menunggu pasang 3.337 Ha;
  - g. area alih muat 1.068 Ha;
  - h. area kapal mati 672 Ha;
  - i. area emergency 341 Ha;
  - j. area karantina 682 Ha.

### **Pasal 3**

Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

## **BAB III**

### **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS**

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Palembang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa kepelabuhanan dilakukan berdasarkan perkembangan angkutan laut, sebagai berikut :
- a. tahap I, dari tahun 2004 s.d 2008;
  - b. tahap II, dari tahun 2009 s.d 2013;
  - c. tahap III, dari tahun 2014 s.d 2028.

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

- (2) Fasilitas pelabuhan yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 5**

Rencana tapak dan rancangan teknis terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan disahkan oleh Direktur Jenderal.

#### **Pasal 6**

Pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan, didahului dengan studi lingkungan.

### **BAB IV**

#### **PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN**

#### **Pasal 8**

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya serta pengembangan Pelabuhan Palembang sebagaimana tercantum dalam Dokumen Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 9**

Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat areal yang dikuasai pihak lain, pelaksanaannya harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Mei 2006

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

**M. HATTA RAJASA**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Kehakiman dan HAM;
7. Menteri Perindustrian;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Pekerjaan Umum;
11. Menteri Negara BUMN;
12. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
13. Gubernur Sumatera Selatan;
14. Walikota Palembang;
15. Para Kepala Biro di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
16. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

  
  
**KALALO NUGROHO**  
NIP. 120105102